

2024

Rencana Kerja

RENJA

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PRABUMULIH**

 [dpmptsp_prabumulih](https://www.instagram.com/dpmptsp_prabumulih)

 dpmptsp.kotaprabumulih.go.id

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas perkenan-Nya kegiatan penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2024 ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan. Dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dengan peraturan turunan Kepmendagri nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Kerja DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2024 ini dilaksanakan dengan fokus pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting DPMPTSP Kota Prabumulih, evaluasi pelaksanaan Renja DPMPTSP Kota Prabumulih tahun 2022 dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kota Prabumulih Tahun 2019-2023.

Dengan tersusunnya Dokumen Rencana Kerja ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan dan penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2024 sehingga sasaran yang telah ditetapkan dalam Renja ini dapat terpenuhi.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan dan partisipasinya dalam penyusunan Dokumen RENJA DPMPTSP Kota Prabumulih tahun 2024.

Prabumulih, Juni 2023
Kepala DPMPTSP,



A. Zahedi, S.Pd.,MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19630501 198803 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dimana tahapan dan tata cara penyusunan RENJA Perangkat Daerah ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Selanjutnya Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih ini memuat program dan kegiatan untuk tahun 2024, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif.

Penyusunan Renja DPMPTSP Kota Prabumulih mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja DPMPTSP Kota Prabumulih tahun 2024 merupakan penjabaran dari kebijakan dan strategi pembangunan yang termuat dalam RKPD Kota Prabumulih Tahun 2024, yang selanjutnya Renja DPMPTSP ini akan menjadi salah satu acuan dalam proses penyusunan RAPBD yaitu

penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) DPMPTSP Tahun 2024. RENJA DPMPTSP Kota Prabumulih memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan tahapan penyusunan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan RENJA.
2. Penyusunan Rancangan Awal RENJA DPMPTSP Kota Prabumulih berpedoman pada RENSTRA DPMPTSP Kota Prabumulih, evaluasi hasil RENJA tahun lalu dan evaluasi hasil RENJA tahun berjalan.
3. Penyusunan Rancangan RENJA berdasarkan Surat Edaran Walikota Prabumulih Nomor 050/210/Bappeda.IV/2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.
4. Perumusan Rancangan Akhir RENJA DPMPTSP Kota Prabumulih.
5. Verifikasi Rancangan Akhir Renja DPMPTSP Kota Prabumulih.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Prabumulih Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2021 Nomor 6);
14. Surat Edaran Walikota Prabumulih Nomor 050/210/Bappeda.IV/2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih adalah untuk menentukan arah

kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan bidang pelayanan terpadu satu pintu.

Tujuan penyusunan RENJA DPMPTSP Tahun 2024 adalah:

1. Mengetahui pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024;
2. Sebagai media untuk mengukur sumber daya serta kemampuan dalam mencapai pelayanan kinerja melalui evaluasi kinerja;
3. Mewujudkan konsistensi antara perencanaan (*planning*) dan penganggaran (*budgeting*);
4. Sebagai acuan dalam penyusunan RKA DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih Tahun 2024 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja seperti: **latar belakang** (yang berisi pengertian, proses penyusunan dan keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya); **landasan hukum** (berisikan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan peraturan lainnya yang menjadi pedoman/ acuan dalam penyusunan perencanaan); **maksud dan tujuan** (berisi maksud dan tujuan dari penyusunan Renja) dan **sistematika penulisan** yang menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD.

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD

Pada bagian ini menjelaskan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan Capaian Rensta, analisis kinerja pelayanan OPD, isu-isu penting penyelenggaraan Tugas

dan fungsi OPD, dan penelaahan usulan program kegiatan masyarakat.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran Renja OPD, serta Program dan Kegiatan.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB V : PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP dan Capaian Renstra DPMPTSP

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu siklus perencanaan pembangunan perangkat daerah yang diawali dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi hasil.

Hasil kinerja secara mandiri ditunjukkan dengan tercapainya target dari Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Kota Prabumulih. Berikut adalah IKU DPMPTSP Kota Prabumulih:

1. Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai SAKIP);
2. Persentase tindak lanjut temuan hasil pengawasan;
3. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan (Nilai IKM);
4. Jumlah investasi PMDN dan PMA (Realisasi Investasi)

Adapun keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) DPMPTSP Kota Prabumulih yang telah direncanakan dan disusun pada tahun 2022 telah berhasil dicapai dengan rincian sebagai berikut:

- Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DPMPTSP pada Tahun 2021 memperoleh nilai sebesar **72,57** dengan kategori “**BB**” masuk dalam interpretasi **Sangat Baik**;
- Persentase tindak lanjut temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti **tingkat capaian kinerjanya sebesar 100%**;
- Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar **88,59** dengan kategori **A** masuk dalam Mutu Pelayanan **SANGAT BAIK**;
- Capaian nilai **realisasi tahun 2022 sebesar Rp446.597.264.375,-** melebihi target yang telah ditentukan oleh BKPM-RI sebesar **Rp296.724.710.000,-**.

Akuntabilitas Kinerja Keuangan DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2022 ditunjukkan dari sisi pengeluaran Belanja Operasi dan Belanja Modal sesuai dengan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dimana anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal DPMPTSP Kota Prabumulih sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA. 2022 ditetapkan sebesar sebesar **Rp5.865.412.571,-**. Dalam pelaksanaannya, belanja Operasi dan Belanja Modal pada DPA TA. 2022 mengalami peningkatan anggaran hingga menjadi **Rp6.119.729.621,-**. Perubahan anggaran belanja operasi dan belanja modal dalam DPA-OPD Perubahan TA. 2022 ini dikarenakan Kebijakan Pemerintah dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Masyarakat sehingga DPMPTSP mendapat penambahan alokasi anggaran sebesar **Rp254.317.050,-** atau sebesar 4,33% dengan rincian anggaran sebesar Rp326.122.000 untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal dan anggaran sebesar Rp47.160.000 untuk tambahan belanja pegawai. Realisasi anggaran belanja operasi dan belanja modal DPMPTSP TA. 2021 sebesar **Rp5.898.180.837,-** atau sebesar **91,66%** dari anggarannya.

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Belanja Langsung Tahun 2022

No	Perangkat Daerah	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Penyediaan Dana (Rp)	Realisasi			
				Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)	
1	DPMPTSP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,701,513,621	5,580,987,117			
		1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15,000,000	15,000,000		
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,000,000	3,000,000	100.00	100.00
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3,000,000	3,000,000	100.00	100.00
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3,000,000	3,000,000	100.00	100.00
		4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,000,000	3,000,000	100.00	100.00
		5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,000,000	3,000,000	100.00	100.00
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,948,307,771	4,846,440,492		
		6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,920,107,771	4,818,240,492	97.93	100.00
		7	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	22,200,000	22,200,000	100.00	100.00
		8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3,000,000	3,000,000	100.00	100.00
		9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3,000,000	3,000,000	100.00	100.00
		3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10,800,000	10,800,000		

No	Perangkat Daerah	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Penyediaan Dana (Rp)	Realisasi		
				Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
		10 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10,800,000	10,800,000	100.00	100.00
		4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	565,788,600	565,606,942		
		11 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,000,000	4,000,000	100.00	100.00
		12 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15,000,000	15,000,000	100.00	100.00
		13 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30,000,000	30,000,000	100.00	100.00
		14 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24,999,600	24,967,500	99.87	100.00
		15 Penyediaan Bahan/Material	41,789,000	41,733,000	99.87	100.00
		16 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450,000,000	449,906,442	99.98	100.00
		5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	106,619,250	90,497,072		
		17 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,500,000	1,500,000	100.00	100.00
		18 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70,079,250	53,957,072	76.99	100.00
		19 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5,040,000	5,040,000	100.00	100.00
		20 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30,000,000	30,000,000	100.00	100.00
		6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54,998,000	52,642,611		

No	Perangkat Daerah	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Penyediaan Dana (Rp)	Realisasi		
					Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
		21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54,998,000	52,642,611	95.72	90.00
2	DPMPTSP	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		10,000,000	10,000,000		
		7	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	10,000,000	10,000,000		
		22	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	10,000,000	10,000,000	100.00	100.00
3	DPMPTSP	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		10,000,000	10,000,000		
		8	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	10,000,000	10,000,000		
		23	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	10,000,000	10,000,000	100.00	100.00
4	DPMPTSP	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		28,000,000	27,542,000		
		9	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	28,000,000	27,542,000		
		24	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	10,000,000	9,652,000	96.52	100.00
		25	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	3,000,000	2,910,000	97.00	100.00

No	Perangkat Daerah	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Penyediaan Dana (Rp)	Realisasi		
					Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
		26	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	15,000,000	14,980,000	99.87	100.00
5	DPMPTSP	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		360,216,000	295,450,000		
		10	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	360,216,000	295,450,000		
		28	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (DAK Non Fisik FPM)	146,150,000	144,750,000	99.04	100.00
		29	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (DAK Non Fisik FPM)	214,066,000	150,700,000	70.40	100.00
6	DPMPTSP	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		10,000,000	10,000,000		
		11	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10,000,000	10,000,000		
		30	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	10,000,000	10,000,000	100.00	100.00
Total				6,119,729,621	5,933,979,117	96.96	

Tabel 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program Renja DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2022

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN DESEMBER		REALISASI SD. BULAN DESEMBER		CAPAIAN
					VOL	%	VOL	%	
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100
2.18.18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU								99.07
2.18 2.18.18 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				100.00		98.81	98.81
2.18 2.18.18 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					100		100	100
2.18 2.18.18 1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (RENJA) DPMPTSP	1	Dokumen	1	100	1	100	100
2.18 2.18.18 1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) DPMPTSP	1	Dokumen	1	100	1	100	100
2.18 2.18.18 1.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencan Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) DPMPTSP	1	Dokumen	1	100	1	100	100
2.18 2.18.18 1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DPMPTSP	1	Laporan	1	100	1	100	100
2.18 2.18.18 1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) DPMPTSP	1	Laporan	1	100	1	100	100
2.18 2.18.18 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					100		93.75	93.75
2.18 2.18.18 1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan untuk Pegawai DPMPTSP	12	Bulan	12	100	9	75	75

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN DESEMBER		REALISASI SD. BULAN DESEMBER		CAPAIAN
					VOL	%	VOL	%	
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100
2.18 2.18.18 1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jasa Administrasi Keuangan DPMPTSP	36	Kali	36	100	36	100	100
2.18 2.18.18 1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun DPMPTSP	1	Laporan	1	100	1	100	100
2.18 2.18.18 1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran DPMPTSP	1	Laporan	1	100	1	100	100
2.18 2.18.18 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					100		100	100
2.18 2.18.18 1.2.03.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jasa Administrasi Penatausahaan Barang Milik Daerah pada DPMPTSP	24	Kali	24	100	24	100	100
2.18 2.18.18 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					100		100	100
2.18 2.18.18 1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Kebutuhan Alat-alat Listrik untuk Penerangan dan Jaringan Listrik	100	Buah	100	100	100	100	100
2.18 2.18.18 1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Kebersihan Kantor dan Tersedianya Kebutuhan Pendukung Kebersihan Kantor	607	Buah	607	100	607	100	100
2.18 2.18.18 1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	1166	Buah	1166	100	1166	100	100

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN DESEMBER		REALISASI SD. BULAN DESEMBER		CAPAIAN
					VOL	%	VOL	%	
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100
2.18 2.18.18 1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang terpenuhi dalam 1 Tahun	14925	Buah	14925	100	14925	100	100
2.18 2.18.18 1.2.06.7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia dalam 1 Tahun	1284	Buah	1284	100	1284	100	100
2.18 2.18.18 1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah dan Luar Daerah dalam 1 Tahun	987	Kali	987	100	987	100	100
2.18 2.18.18 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100		100	100
2.18 2.18.18 1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat (Materai dan Benda Pos Lainnya)	150	Buah	150	100	150	100	100
2.18 2.18.18 1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Layanan Telepon, Internet dan Listrik dalam 1 Tahun	24	Rekening	24	100	24	100	100
2.18 2.18.18 1.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	2	Kali	2	100	2	100	100
2.18 2.18.18 1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor DPMPSTSP dalam 1 Tahun	48	Kali	48	100	48	100	100
2.18 2.18.18 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100		100	100
2.18 2.18.18 1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (STNK) dan Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	3601	Liter, Buah dan STNK	3601	100	3601	100	100
2.18 2.18.18 2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	-				100.00		100.00	100

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN DESEMBER		REALISASI SD. BULAN DESEMBER		CAPAIAN
					VOL	%	VOL	%	
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100
2.18 2.18.18 2 2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota					100		100	100
2.18 2.18.18 2.2.02.2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Pendataan UMKM Kecamatan-Kecamatan di Kota Prabumulih	1	Dokumen	1	100	1	100	100
2.18 2.18.18 3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	-				100.00		100.00	100
2.18 2.18.18 3 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					100		100	100
2.18 2.18.18 3.2.01.1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Pembuatan Video Publikasi Profil Investasi	1	Jenis	1	100	1	100	100
2.18 2.18.18 4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	-				100.00		100.00	100
2.18 2.18.18 4 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota					100		100	100
2.18 2.18.18 4.2.01.2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) DPMPTSP Kota Prabumulih	2	Laporan	2	100	2	100	100
2.18 2.18.18 4.2.01.3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pengaduan dan Tindaklanjut Pengaduan Masyarakat	4	Laporan	4	100	4	100	100
2.18 2.18.18 4.2.01.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	58	Kali	58	100	58	100	100

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN DESEMBER		REALISASI SD. BULAN DESEMBER		CAPAIAN
					VOL	%	VOL	%	
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100
2.18 2.18.18 5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	-				100.00		100.00	100
2.18 2.18.18 5 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					100		100	100
2.18 2.18.18 5.2.01.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang dibina tentang ketentuan pelaksanaan penanaman modal	217	Pelaku Usaha	217	100	217	100	100
2.18 2.18.18 5.2.01.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan/Pelaku Usaha yang diawasi dengan Mekanisme/Pelaksana BAP dan Jumlah Perusahaan/Pelaku Usaha yang telah dilakukan Penyelesaian Masalah	21	Pelaku Usaha	21	100	21	100	100
2.18 2.18.18 6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	-				100.00		100.00	100
2.18 2.18.18 6 2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					100		100	100
2.18 2.18.18 6.2.01.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Fitur Pengembangan Data Informasi di Website DPMPTSP	2	Kali	2	100	2	100	100

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP

1. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih dikeluarkan oleh Inspektorat dengan melakukan evaluasi terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran/Kinerja OPD. Evaluasi dilakukan terhadap dokumen Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran/Kinerja OPD. Pada **tahun 2021** yang lalu hasil evaluasi DPMPTSP Kota Prabumulih memperoleh nilai sebesar **72,57** dengan kategori **“BB”** masuk dalam interpretasi **Sangat Baik** dan sesuai target yang telah ditetapkan, yang berarti Akuntabilitas kerjanya sangat baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar. Untuk tahun 2022 ini **target nilai SAKIP DPMPTSP** adalah **“BB”** tetapi untuk hasil evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja DPMPTSP 2022, belum dilakukan evaluasi oleh Inspektorat sampai dengan bulan Januari 2023. Dengan hasil evaluasi diatas pada tanggal 13 September 2022, **“Walikota Prabumulih”** telah memberikan **“Apresiasi dan Penghargaan kepada DPMPTSP Kota Prabumulih atas Partisipasinya dalam Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021 diberikan Predikat Nilai “BB” dengan interpretasi Sangat Baik”**.



Gambar. 2.1 Piagam Penghargaan Akuntabilitas Kinerja

2. Audit tim Inspektorat Kota Prabumulih berdasarkan Surat Tugas dari Inspektur Kota Prabumulih Nomor: 700/390/ST/Inspektorat/2022 tanggal 03 Oktober 2022 perihal Melakukan Audit Kinerja Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih Tahun 2021, yang dilaksanakan pada tanggal 03 s.d 21 Oktober 2022 di Kantor DPMPSTSP Kota Prabumulih terdapat temuan sebagai berikut:

a. TAHAP PELAKSANAAN

1) ASPEK EKONOMIS

Temuan/ Penyebab

Belum optimalnya kinerja terhadap realisasi belanja habis pakai yang hanya mencapai 49,93%, disebabkan oleh ketidakpatuhan/tidak konsisten PPK dalam merealisasikan belanja habis pakai, belanja lainnya.

Tindak Lanjut dari Auditee DPMPSTSP Kota Prabumulih

Auditee tidak sependapat dengan hasil audit tersebut karena realisasi belanja habis pakai pada program kegiatan pelaksanaan penanaman modal tahun 2021 sebesar Rp. 64.856.000,- (Enam Puluh Empat Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) atau sebesar 93,44% (Sembilan Puluh Tiga Koma Empat Puluh Empat Persen), dengan rincian sebagai berikut:

No	Program	Kegiatan	Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
1.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan PM	Belanja Barang Pakai Habis			
			- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- ATK	Rp. 2.974.000,-	Rp. 2.974.000,-	100%
		1.2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan PM	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp. 1.826.000,-	Rp. 1.826.000,-	100%
			Belanja Barang Pakai Habis			
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- ATK	Rp. 3.578.000,-	Rp. 3.578.000,-	100%	
			- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp. 756.000,-	Rp. 756.000,-	100%
		1.3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan PM	Belanja Habis Pakai			
			- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- ATK	Rp. 13.372.000,-	Rp. 13.372.000,-	100%
			- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp. 10.500.000,-	Rp. 10.500.000,-	100%
- Belanja Makan Minum Rapat	Rp. 36.400.000,-	Rp. 31.850.000,-	92.45%			
Total				Rp. 69.406.000,-	Rp. 64.856.000,-	93.44%

2) ASPEK EFISIENSI

Temuan/ Penyebab

Pada Poin 1)

Belum Optimalnya kinerja kecepatan waktu penerbitan izin yang melampaui atau melebihi batas waktu yang ditentukan berdasarkan perwako nomor 83 tahun 2020 tentang standar operasional prosedur (SOP) pelayanan perizinan dan non perizinan yang hanya mencapai 50 % disebabkan berikut:

- *Kelemahan antara petugas pelayanan perizinan (Front Office) dengan tim teknis perizinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.*

Tindak Lanjut dari Auditee DPMPTSP Kota Prabumulih

Pada prinsipnya temuan ini telah dilaporkan pada laporan hasil reuiu kinerja tata kelola perizinan tahun 2021 dan telah ditindaklanjuti degan mengadakan rapat koordinasi internal seluruh pegawai FO dan BO serta analis kebijakan pada tanggal 18 agustus 2022.

Dalam pencapaian target SOP pelayanan mesti di perhatikan beberapa hal :

1. Harus berkoordinasi dengan tim teknis terkait berkas yang telah diterima oleh *front office*

2. Harus cepat tanggap (*responsibility*)

Untuk mempercepat koordinasi dengan tim teknis adalah dengan membentuk tim narahubung yang berfungsi sebagai petugas koordinasi antar langsung berkas perizinan di dinas terkait sehingga tidak ada penumpukan berkas di DPMPTSP.

Adapun narahubung yang ditunjuk adalah:

1. Eka Ariadi
2. Logi Mandela
3. M. Ricky Meirvian

Temuan/ Penyebab

Pada Poin 2)

Belum optimalnya ketepatan sasaran dalam melakukan koordinasi perjalanan dinas ke OPD atau Kementrian terkait untuk meningkatkan nilai investasi yang hanya mencapai 50 % disebabkan oleh karena perjalanan dinas yang dilakukan belum tepat sasaran.

Tindak Lanjut dari Auditee DPMPTSP Kota Prabumulih

Auditee tidak sependapat dengan hasil audit tersebut karena menurut Auditee bahwa perjalanan dinas yang dilakukan sudah tepat berdasarkan Peraturan BKPM RI Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal TA 2021, Bab II, halaman 29, Point E ketentuan pembiayaan huruf b dan c yang berbunyi :

“Huruf b. Aparatur DPMPTSP Kabupaten / Kota dapat menggunakan anggaran perjalanan Dinas DAK untuk 2 orang atas undangan Kepala DPMPTSP Provinsi / yang mewakili sebanyak banyaknya 2 kali dalam setahun”.

“Huruf c. Aparatur DPMPTSP Provinsi dan DPMPTSP Kabupaten / Kota dapat menggunakan anggaran perjalanan dinas DAK untuk 2 orang atas undangan Kepala BKPM atau yang mewakili sebanyak-banyaknya 1 kali dalam setahun”.

Dalam penggunaan anggaran DAK NF FPM tahun anggaran 2021 untuk perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan oleh Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal terikat oleh juknis tersebut.

Adapun perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan tersebut :

Uraian	Anggaran	Realisasi	Silpa
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp. 18.316.000,00	Rp.9.278.994,00	Rp.9.037.006,00

Jadi realisasi penyerapan anggaran perjalanan dinas tersebut besar Rp. 9.278.994,00 (50,66%). Dan sisanya tidak dapat digunakan untuk melaksanakan koordinasi peningkatan investasi dikarenakan ketentuan dari aturan tersebut (Peraturan BKPM RI Nomor 10 Tahun 2020).

Temuan/ Penyebab

Pada Poin 3)

Belum optimalnya jumlah perizinan yang dikeluarkan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan, hanya mencapai 66,67% disebabkan karena penentuan jenis perizinan yang dikeluarkan oleh DPMPTSP belum sepenuhnya dipahami.

Tindak Lanjut dari Auditee DPMPTSP Kota Prabumulih

Auditee sependapat dengan hasil audit tersebut, hal ini dikarenakan pada saat audit dilaksanakan bersamaan dengan masa transisi/peralihan dari jenis perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ke Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Dimana pada saat itu dalam masa Sosialisasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), persiapan tim teknis, persiapan Operator dan Sumber Daya Manusia (SDM) Aplikasi SIMBG di DPMPTSP dan Sosialisasi tentang PBG dan SIMBG kepada masyarakat.

Temuan/ Penyebab

Pada Poin 4)

Belum optimalnya kinerja ketepatan sasaran kriteria perusahaan/pelaku usaha yang diundang dalam kegiatan sosialisasi yang hanya mencapai 50 % disebabkan oleh peserta yang datang hanya sebagian pelaku usaha.

Tindak Lanjut dari Auditee DPMPTSP Kota Prabumulih

Auditee tidak sependapat dengan hasil audit tersebut karena menurut *Auditee* dalam menentukan/menetapkan sasaran peserta sosialisasi sudah tepat dan jumlah peserta sosialisasi pun sudah mencukupi dan atau melebihi dari target (perencanaan dan atau DPA TA 2021).

Dalam menentukan/menetapkan sasaran peserta sosialisasi, *Auditee* berpedoman pada Peraturan BKPM RI Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Peraturan BKPM RI Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal TA 2021; yang mana peserta sosialisasi adalah seluruh pelaku usaha baik UMKM maupun Non UMKM (perusahaan), serta ruang lingkup materi sosialisasi pun sesuai Juknis yang meliputi:

- Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal;
- Sosialisasi Kemitraan Usaha;
- Bimbingan Teknis Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; dan
- Bimbingan Teknis Tata Cara Penyampaian LKPM Online Perizinan Berusaha.

Untuk jumlah peserta sosialisasi sesuai target di rencana kerja dan atau DPA TA 2021 berjumlah 182 peserta/pelaku usaha, realisasi total peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi berjumlah 385

peserta/pelaku usaha baik UMKM maupun Non UMKM (perusahaan). Jadi peserta sosialisasi tersebut over target sebesar 211,54 %.

3) ASPEK EFEKTIVITAS

Temuan/ Penyebab

Pada Poin 1)

Belum Optimalnya penyusunan Key Performance Indicator (KPI) dalam menetapkan indikator kinerja belum mencerminkan outcomes yang jelas dan terukur dari kegiatan atau output perusahaan yang secara spesifik dapat diukur untuk mencapai keberhasilan kinerja dalam pengukuran jumlah Investasi yang masuk Kota Prabumulih disebabkan oleh upaya yang dilakukan dalam mendatangkan Investor ke Kota Prabumulih belum maksimal.

Tindak Lanjut dari Auditee DPMPTSP Kota Prabumulih

Auditee sependapat dengan hasil audit tersebut karena menurut Auditee dalam upaya mendatangkan Investor ke Kota Prabumulih belum maksimal terkendala belum tersedianya dokumen potensi daerah yang akan ditawarkan ke investor baik luar negeri maupun dalam negeri. Dimana dokumen tersebut harus tersusun secara terstruktur dan akademis yang dibuat oleh tenaga ahli, sehingga membutuhkan biaya/anggaran yang cukup besar.

Auditee belum bisa menyediakan anggaran dalam pembuatan dokumen potensi daerah sehingga sampai sekarang belum tersedia dokumen tersebut; yang berdampak belum maksimalnya Auditee dalam mendatangkan investor baik luar negeri maupun dalam negeri.

Temuan/ Penyebab

Pada Poin 2)

Belum optimalnya kinerja ketepatan sasaran peserta yang diundang dalam kegiatan sosialisasi yang hanya mencapai 50% disebabkan oleh peserta yang datang hanya UMKM.

Tindak Lanjut dari Auditee DPMPTSP Kota Prabumulih

Auditee tidak sependapat dengan hasil audit tersebut karena menurut Auditee dalam menentukan/menetapkan sasaran peserta sosialisasi sudah tepat dan jumlah peserta sosialisasi pun sudah mencukupi dan atau melebihi dari target (perencanaan dan atau DPA TA 2021).

Dalam menentukan/menetapkan sasaran peserta sosialisasi, *Auditee* berpedoman pada Peraturan BKPM RI Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Peraturan BKPM RI Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal TA 2021; yang mana peserta sosialisasi adalah seluruh pelaku usaha baik UMKM maupun Non UMKM (perusahaan), serta ruang lingkup materi sosialisasi pun sesuai Juknis yang meliputi:

- Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal;
- Sosialisasi Kemitraan Usaha;
- Bimbingan Teknis Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; dan
- Bimbingan Teknis Tata Cara Penyampaian LKPM Online Perizinan Berusaha.

Untuk jumlah peserta sosialisasi sesuai target di rencana kerja dan atau DPA TA 2021 berjumlah 182 peserta/pelaku usaha, realisasi total peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi berjumlah 385 peserta/pelaku usaha baik UMKM maupun Non UMKM (perusahaan). Jadi peserta sosialisasi tersebut over target sebesar 211,54 %.

Temuan/ Penyebab

Pada Poin 3)

Belum optimalnya realisasi investasi penanaman modal tahun 2021 dari target yang ditetapkan hanya tercapai 66,67% disebabkan oleh belum adanya pemisahan antara capaian target menurut Renstra dan target menurut Kementerian/BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal).

Tindak Lanjut dari *Auditee* DPMPTSP Kota Prabumulih

Auditee tidak sependapat dengan hasil audit tersebut karena menurut *Auditee* laporan realisasi investasi Kota Prabumulih sudah melebihi target baik dari target Renstra maupun target dari BKPM tahun 2021.

- Target Realisasi Investasi berdasarkan Renstra tahun 2021 sebesar Rp75.000.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Milyar Rupiah) sedangkan Realisasinya sebesar Rp275.031.334.605,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Milyar Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu

Enam Ratus Lima Rupiah), over target sebesar 366,71% (Tiga Ratus Enam Puluh Enam Koma Tujuh Puluh Satu Persen).

- Target Realisasi Investasi berdasarkan BKPM RI tahun 2021 sebesar Rp150.000.000.000,- (Seratus Lima Puluh Milyar Rupiah) sedangkan Realisasinya sebesar Rp298.850.711.987,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah), over target sebesar 199,23% (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Persen).

4) TAHAP PELAPORAN

Temuan/ Penyebab

Pada Poin 1)

Belum optimalnya kinerja ketertiban pelaporan dalam monitoring dan evaluasi program dan kegiatan yang hanya mencapai 77,78% disebabkan oleh keterlambatan dalam menyampaikan laporan melebihi tanggal yang ditetapkan dalam pelaporan berdasarkan peraturan BKPM RI No. 7 Tahun 2018 tentang pedoman dan Tata cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Tindak Lanjut dari Auditee DPMPTSP Kota Prabumulih

Auditee sependapat dengan hasil audit tersebut karena beberapa pelaku usaha terlambat melaporkan kegiatan penanaman modalnya (LKPM Online) walaupun Auditee/Tim Pemantau Bidang Dallak sudah menginformasikan/menghimbau pelaku usaha agar segera melaporkan kegiatan usahanya di waktu kewajiban pelaporan (Semester/Triwulan).

Untuk kedepan Auditee akan lebih intens menghimbau pelaku usaha dalam membuat laporan kegiatan penanaman modalnya (LKPM Online) secara berkala dan tepat waktu.

Dalam pelaksanaannya tim Inspektorat Kota Prabumulih memberikan rekomendasi kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih untuk:

- a. Memerintahkan Petugas Pelayanan Perizinan (Front Office) dan Tim Teknis Perizinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mempedomani dan mematuhi SOP/ Peraturan yang telah ditetapkan.

- b. Melaksanakan Koordinasi untuk meningkatkan investasi kepada pihak terkait secara selektif dan efektif.
 - c. Menyusun Program dan Kegiatan dimasa yang akan datang agar menetapkan target terperinci/ terukur.
 - d. Menyusun kriteria yang lebih efektif dan selektif terhadap peserta/ perusahaan yang diundang dalam kegiatan meningkatkan investasi pada Pemerintah Kota Prabumulih dimasa yang akan datang.
 - e. Memerintahkan pejabat yang diberikan wewenang agar membuat laporan realisasi investasi secara terperinci sesuai dengan *core business* DPMPTSP Kota Prabumulih.
 - f. Menghimbau para Pelaku Usaha dalam menyampaikan Pelaporan LKPM tidak melebihi batas yang telah ditentukan.
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih melaksanakan kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat 2 (dua) periode selama tahun 2022, yaitu pada **Semester Pertama** dilaksanakan pada bulan Januari s.d Juni 2022 dan **Semester Kedua** pada bulan Juli s.d Desember 2022. Sebagai dasar hukum kegiatan survey ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Variabel penelitian yang digunakan dalam survei kepuasan masyarakat ini terdiri dari 9 (sembilan) variabel, yaitu: persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu/kecepatan pelayanan, biaya/tarif, kesesuaian produk layanan, kompetensi pelaksana layanan, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan serta sarana dan prasarana.
- **Survey Semester Pertama (Periode Januari – Juni 2022)**

Responden untuk Survey Kepuasan Masyarakat ini adalah Pelanggan atau Masyarakat Pembuat Izin pada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Terdiri dari 100 sampai 200 Orang Responden yang dipilih secara acak/random pada saat pengguna izin mengambil izin yang sudah selesai. Lokasi dari Pengumpulan data sendiri dilakukan pada *Front Office* loket 4. Berdasarkan Hasil Nilai Indeks Unit Pelayanan perizinan di DPMPTSP Kota Prabumulih semester 1 tahun 2022 diperoleh hasil, **Nilai IKM 87.34** yang memiliki **Mutu Pelayanan “B”**, serta Kinerja Unit Pelayanan DPMPTSP Kota Prabumulih Semester 1 tahun 2022 adalah **”BAIK”**. Survei Kepuasan Masyarakat semester 1 ini dilaksanakan

di tengah Pemulihan Ekonomi dan pasca pandemi covid-19. Walaupun demikian survei tetap dijalankan dengan segala keterbatasan sehingga diperoleh 150 responden yang bisa mengisi kuesioner.

- **Survei Semester Kedua (Periode Juli – Desember 2022)**

Berdasarkan Hasil Nilai Indeks Unit Pelayanan perizinan di DPMPTSP Kota Prabumulih Semester II tahun 2022 diperoleh hasil, **Nilai IKM 89.85** dengan **Mutu Pelayanan “A”**, serta Kinerja Unit Pelayanan DPMPTSP Kota Prabumulih semester II tahun 2022 adalah ” **SANGAT BAIK**“.

Jadi, untuk nilai IKM DPMPTSP Tahun 2022 adalah jumlah nilai rata-rata IKM Semester 1 dan Semester 2, maka didapat **nilai IKM Tahun 2022** adalah **88,59** dengan **Mutu Layanan “SANGAT BAIK”**. Akan tetapi nilai ini belum melebihi target kinerja yang telah ditetapkan yaitu **88**.

Tabel 3.4 Nilai IKM DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2022

Tahun	Semester 1		Semester 2		Rata-Rata Thn 2022	
	Nilai IKM	Mutu Layanan	Nilai IKM	Mutu Layanan	Nilai IKM	Mutu Layanan
2022	87,34	B	89,85	A	88,59	A

Sumber: Laporan SKM DPMPTSP Kota Prabumulih Th.2022

4. Berdasarkan Renstra DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2018-2023, DPMPTSP pada tahun 2022 mempunyai target investasi sebesar **Rp100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah)**, sementara berdasarkan target BKPM RI, DPMPTSP Kota Prabumulih dibebankan target investasi sebesar **Rp296.724.710.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)**. Realisasi Investasi Kota Prabumulih Tahun 2022 **Rp446.597.264.375,- (Empat Ratus Empat Puluh Enam Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah)**. Dari data tersebut DPMPTSP telah mampu melampaui target yang ditentukan diatas, dengan pencapaian persentase sebesar **149,4%** dari target yang telah ditentukan BKPM-RI. Secara matematis, pencapaian tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

$$\text{Nilai Capaian Investasi Tahun 2022} = \frac{\text{Nilai Realisasi Investasi Tahun 2022}}{\text{Nilai Target Investasi Tahun 2022}} \times 100$$

$$= \frac{\text{Rp 446.597.264.375}}{\text{Rp 296.724.710.000}} \times 100$$

$$= 150,5 \%$$

5. Pada periode Januari - Desember 2022 terdapat 1 (satu) laporan pengaduan masyarakat yang di terima oleh DPMPTSP Kota Prabumulih perihal pengaduan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yaitu:

- Pada tanggal 07 April 2022, pengaduan a.n Saudara Rifa'iyang beralamat di Jalan Bukit Lebar I Rt 005 RW 003 Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, mengenai permasalahan "Penyerobotan Tanah untuk berdirinya pagar oleh Saudara Holidi.

Dari pengaduan tersebut telah dilakukan penanganan dan tindak lanjut oleh Bidang Pengaduan Layanan DPMPTSP Kota Prabumulih mulai dengan berkoordinasi dengan Kedua Belah Pihak dan Instansi Pemerintahan setempat (Kelurahan). DPMPTSP menginisiasi untuk memediasi antara kedua belah pihak yang difasilitasi oleh Kelurahan karena dalam permasalahan ini DPMPTSP Kota Prabumulih tidak ada kaitan dengan permasalahan tersebut, karena DPMPTSP Kota Prabumulih belum mengeluarkan produk perizinan apapun atas nama Saudara Holidi. Dalam hal ini pengaduan masyarakat pada periode Tahun 2022 telah ditindaklanjuti 100%.

2.3 Evaluasi Kinerja Sasaran

DPMPTSP Kota Prabumulih mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dalam pelaksanaannya, DPMPTSP Kota Prabumulih bersinergi dengan berbagai lembaga vertikal guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pelayanan publik yang baik merupakan muara dari reformasi birokrasi, oleh karena itu upaya meningkatkan kinerja organisasi layanan publik yang harus dilakukan secara terus menerus sehingga masyarakat dapat menerima layanan sesuai kebutuhannya. Cara yang harus dilakukan meliputi merubah *mindset* birokrat dari bermental penguasa menjadi birokrat yang bermental pelayan masyarakat, penataan kelembagaan pelayan publik, penyederhanaan prosedur pelayanan, penerapan standar pelayanan minimal, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pelayanan, penerapan sistem manajemen mutu dalam pelayanan publik serta penanganan pengaduan masyarakat yang selaras dengan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024. Pada tanggal 30 Desember 2022, “**Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan** melalui **Kepala Cabang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Prabumulih (ME, OKU, OKUS)**” telah memberikan “**Apresiasi dan Penghargaan kepada DPMPTSP Kota Prabumulih atas Dukungan dan Peran Aktifnya Dalam Meningkatkan Kepatuhan Badan Usaha**”.



Gambar 2.2 Piagam Penghargaan Penyelenggara Pelayanan Publik

Pada tahun anggaran 2022, DPMPTSP telah melaksanakan kinerja anggaran yang berkualitas. Implementasi anggaran yang berkualitas ini dapat dilihat dari optimalnya anggaran yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan sehingga harapan *output*, *outcome* dan *impact* dapat terwujud. Secara keseluruhan program dan kegiatan yang dianggarkan pada tahun 2022 telah terealisasi sesuai dan mendekati target yang telah ditentukan yaitu sebesar 96,96%.

Perubahan postur anggaran DPMPTSP Kota Prabumulih TA 2022 tidak mengalami banyak perubahan hanya mengalami sedikit penambahan anggaran pada program/kegiatan yang telah disusun pada Rencana Kerja TA 2022. Penambahan anggaran belanja operasi dalam DPA-OPD Pergeseran TA 2022 ini dikarenakan Kebijakan Pemerintah dalam Rangka Pemulihan Ekonomi pasca pandemi Covid-19 dan peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan serta peningkatan investasi penanaman modal di Kota Prabumulih sehingga DPMPTSP mendapat penambahan dan penyesuaian pada anggaran Sub Kegiatan

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal serta Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal. Sehingga demikian, kinerja DPMPTSP tahun 2022 tetap berjalan dan target-target yang telah ditetapkan pada tujuan dan sasaran strategis dapat tercapai di tahun 2022. Implementasi anggaran berkualitas DPMPTSP adalah:

1. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usahayang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala (Pasal 1 angka (41) Peraturan BKPM No. 7 Tahun 2018). LKPM ini disampaikan setiap triwulan bagi perusahaan yang sedang dalam proses pembangunan atau belum berproduksi, dan laporan semesterwajib bagi perusahaan yang masih dalam tahap konstruksi. Pelaku usaha wajib melaporkan seluruh kegiatan penanaman modalnya melalui *aplikasi LKPM online*.

DPMPTSP Kota Prabumulih sebagai instansi yang membidangi penanaman modal Kota Prabumulih melaksanakan kegiatan pemantauan investasi di Kota Prabumulih secara rutin melalui LKPM online, dan didapatkan data total nilai realisasi investasi di Kota Prabumulih tahun 2022 sebesar **Rp446.597.264.375,- (Empat Ratus Empat Puluh Enam Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah)**. Adapun data investasi per triwulan tahun 2021 dan 2022 disajikan pada grafik di bawah.

Gambar 2.3 Grafik Investasi Per Triwulan Tahun 2021 dan 2022 Kota Prabumulih

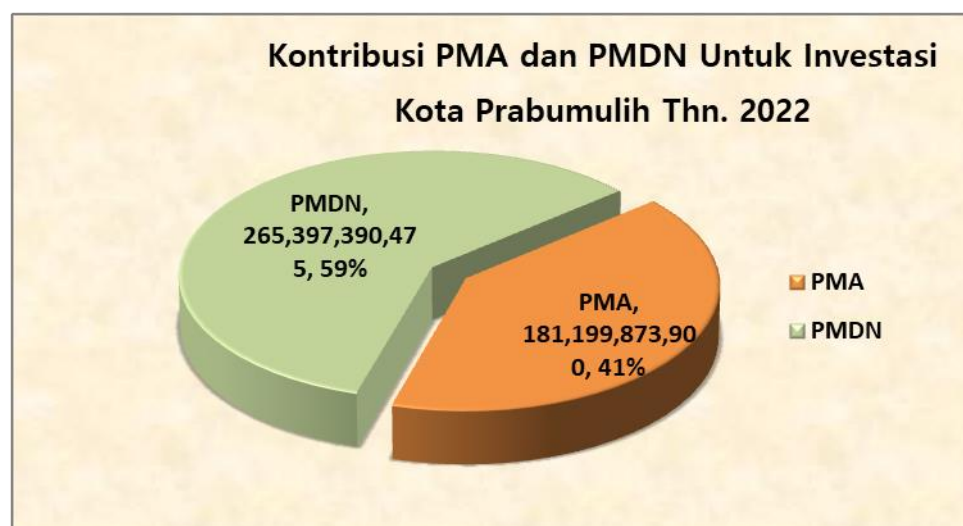


Berdasarkan grafik di atas, total **nilai investasi di tahun 2021 sebesar Rp298.850.711.987,-** dan terjadi peningkatan total **nilai investasi di tahun 2022 sebesar Rp446.597.264.375,-** sementara untuk capaian nilai investasi juga telah melebihi target di tahun 2022 yang telah ditentukan oleh BKPM-RI sebesar **Rp296.724.710.000,-**. Nilai investasi di Kota Prabumulih tahun 2022 mengalami **peningkatan sebesar 49,44% (year-on-year)**.

Peningkatan realisasi investasi di Kota Prabumulih terjadi karena meningkatnya nilai investasi kegiatan penanaman modal dari PT. Kalingga Murda, dimana pada tahun 2021 PT. Kalingga Murdayang bergerak dibidang real estate dengan total nilai investasi mencapai Rp2,32 Milyar sedangkan pada tahun 2022 PT. Kalingga Murdatotal nilai investasinya meningkat menjadi sebesar Rp158,27 Milyar. Kemudian pada tahun 2022 terdapat penambahan dari PT. Subur Sedayu Maju yang merupakan perusahaan baru yang bergerak dibidang jasa dengan total nilai sebesar Rp92,47 Milyar.

Berdasarkan jenisnya, realisasi investasi penanaman modal dibagi 2 (dua) yaitu: Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Berikut besaran kontribusi PMA dan PMDN atas nilai total investasi Kota Prabumulih tahun 2022.

Gambar 2.4 Grafik Kontribusi PMA dan PMDN Kota Prabumulih Tahun 2022

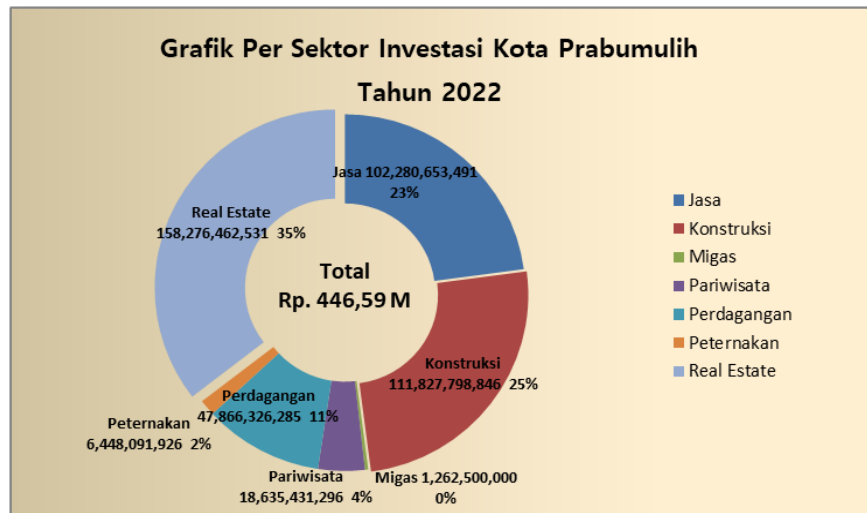


Sumber: *LKPM Online 2022*, diolah

Berdasarkan grafik di atas, realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) masih mendominasi dan memiliki kontribusi besar dengan total nilai investasi sebesar Rp265.39 milyar (59%), sedangkan untuk Penanaman Modal Asing (PMA) pada tahun 2022 ini tercatat sebesar

Rp181.19 milyar (41%) dimana untuk nilai PMA ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2021 yaitu sebesar Rp157,3 milyar atau sekitar 660,7%. Realisasi investasi PMA di Kota Prabumulih berasal dari investor negara Belanda (Sektor Perhotelan dan Sektor Real Estate), Malaysia (Sektor Peternakan) dan Singapore (Sektor Perdagangan). Selanjutnya, berdasarkan laporan penanaman modal per sektor untuk lebih lengkap dapat dilihat pada grafik berikut:

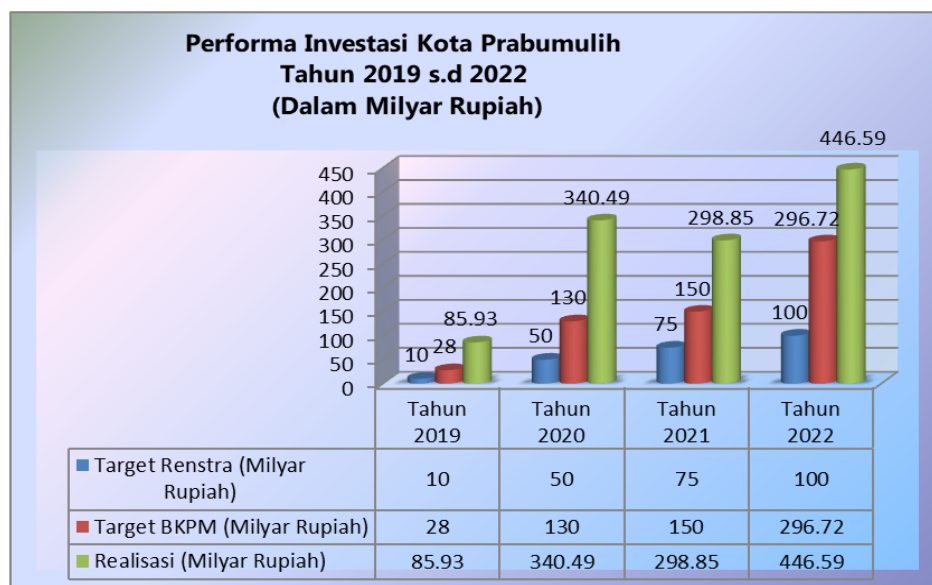
Gambar 2.5 Grafik Laporan Per Sektor Investasi Kota Prabumulih 2022



Sumber: LKPM Online 2022, diolah

Berdasarkan grafik di atas, investasi di sektor Real Estate berkontribusi terbesar dibanding sektor lainnya yaitu sebesar Rp158,27 milyar (35%), dan terbesar kedua pada sektor konstruksi sebesar Rp111,82 milyar (25%) dan terbesar ketiga adalah sektor Jasa sebesar Rp102,28 milyar (23%). Untuk performa investasi Kota Prabumulih dari tahun 2019 sampai 2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 2.6 Grafik Performa Investasi Kota Prabumulih Tahun 2019 s.d 2022

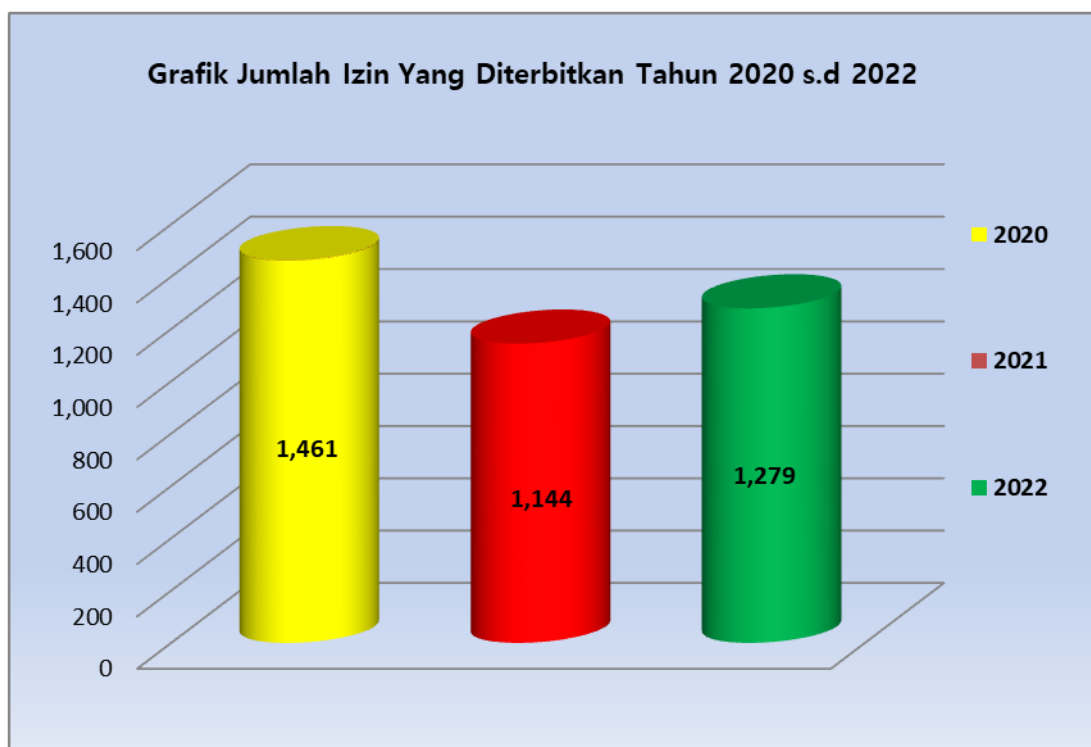


Sumber: Data LKPM Online

Salah satu tujuan strategis DPMPTSP Kota Prabumulih selain meningkatnya tata kelola dan kualitas pelayanan publik adalah meningkatnya realisasi investasi penanaman modal di Kota Prabumulih. Setiap tahun target investasi Kota Prabumulih ditentukan oleh BKPM RI melalui DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan target investasi Renstra sudah ditentukan pada awal pembuatan Renstra DPMPTSP 2018-2023. Dari grafik di atas, realisasi investasi kota Prabumulih dari tahun 2019 sampai 2022 melebihi target yang telah ditetapkan. Untuk tahun 2022, target yang ditentukan oleh BKPM adalah sebesar Rp296,7 Milyar dan nilai realisasinya sebesar Rp446,59 Milyar atau persentase pencapaiannya sebesar 150,5% dari target yang telah ditentukan.

2. Dalam era digitalisasi ini, bidang perizinan DPMPTSP Kota Prabumulih telah menerapkan sistem Tanda Tangan Elektronik/TTE (*Digital Signature*) dalam dokumen dinas perizinan usaha sejak tahun 2019, dengan menggunakan TTE ini artinya DPMPTSP Kota Prabumulih telah melaksanakan tujuan strategis dari *e-government* yaitu menata sistem manajemen dan proses kerja secara holistik serta memanfaatkan teknologi secara optimal. Adapun jumlah izin yang telah diterbitkan oleh DPMPTSP Kota Prabumulih dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar 2.7 Grafik Daftar Jumlah Izin Yang Diterbitkan Th. 2020 s.d 2022



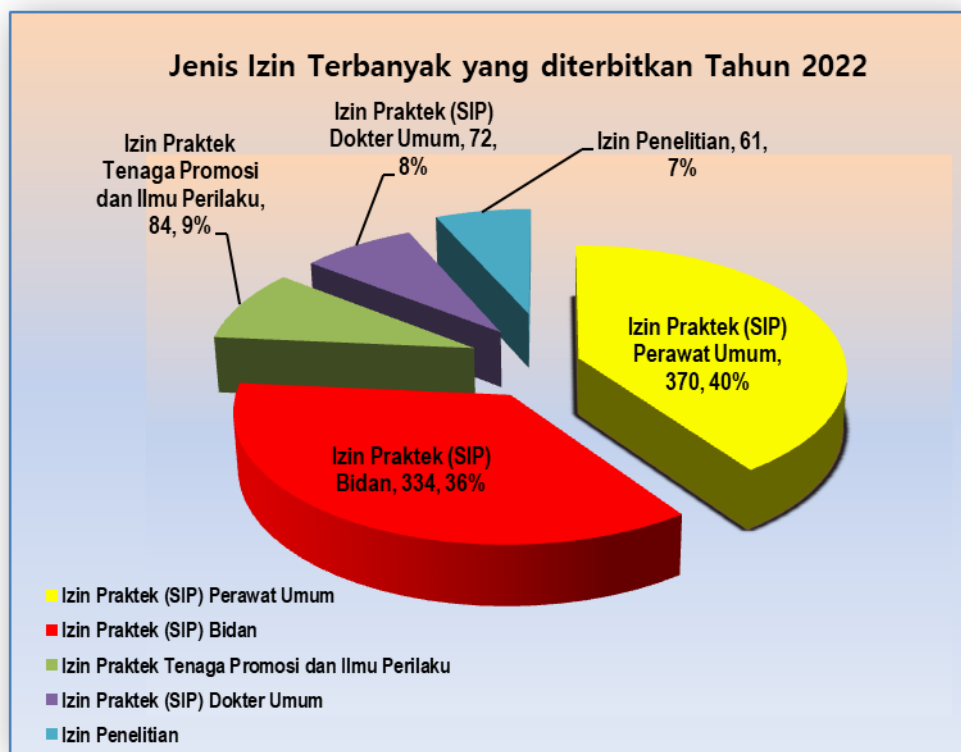
Sumber: Bidang Perizinan, DPMPTSP Kota Prabumulih

Pada grafik diatas, jumlah izin yang diterbitkan DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2022 adalah sebanyak **1279 (Seribu dua ratus tujuh puluh sembilan)**

izin, dan mengalami peningkatan jumlah izin yang diterbitkan sebesar 11,20% jika dibandingkan dengan tahun 2021. (Data lengkap perizinan yang diterbitkan dapat dilihat pada lampiran).

Memacu investasi berkelanjutan menuju pemulihan ekonomi Kota Prabumulih Pasca Covid-19 telah menjadi keharusan untuk DPMPTSP Kota Prabumulih harus meningkatkan Layanan Perizinan dan Non Perizinan agar beroperasi secara optimal dengan tetap menerapkan protokol kesehatan bagi masyarakat yang datang langsung ke kantor DPMPTSP Kota Prabumulih serta bagi masyarakat yang berkendala untuk datang ke kantor atau yang akan mengurus perizinan secara *online* dapat menggunakan layanan sistem *Online Single Submission* (OSS) atau perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik secara mandiri. Dari 108 (*Seratus Delapan*) jenis izin yang dikeluarkan oleh DPMPTSP Kota Prabumulih tahun 2022, berikut 5 jenis izin terbanyak yang diterbitkan dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2.8 Grafik Jenis Izin Terbanyak yang diterbitkan Th. 2022



Sumber: Bidang Perizinan dan Bidang Pengolahan Data Informasi, diolah

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Prabumulih

No	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Angka/Nilai Target/Standar (IKU/SPM/IKK)	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai SAKIP	Predikat	CC	B	B	BB	A	B	BB	BB	A	
2	Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	84	84	88	88	88	84,5	85,39	88	88,4	
4	Jumlah Investasi Berskala Nasional (PMDN)	Milyar	10	50	75	100	125	Rp340,4 Milyar	Rp298,8 Milyar	Rp220 Milyar	Rp300 Milyar	

2.4 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal di Kota Prabumulih dengan 3 (tiga) sasaran strategis yaitu: meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan DPMPTSP, meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan/non perizinan dan meningkatkan realisasi investasi di Kota Prabumulih.

Sejauh ini kinerja pengelolaan di DPMPTSP Kota Prabumulih masih perlu terus dioptimalkan, sehingga penyelenggaraan penanaman modal yang berkelanjutan dan pelayanan terpadu satu pintu dapat menjadi lebih baik.

Salah satu isu penting yang dihadapi oleh DPMPTSP Kota Prabumulih sampai saat ini adalah belum adanya Cetak Biru (*Masterplan*) Peta Potensi Investasi Kota Prabumulih yang menjadi sumber data spasial potensi investasi yang terintegrasi dengan basis data potensi sumber daya lainnya. Peta potensi ini dapat memberi kemudahan bagi calon investor untuk menemukan potensi Kota Prabumulih berdasarkan data dan informasi yang valid. Selain belum tersedianya *masterplan* kota Prabumulih, masih terdapat beberapa permasalahan dan hambatan lainnya seperti:

1. Belum tercukupinya kebutuhan Sumber Daya Aparatur yang kompeten sehingga berdampak pada kinerja aparatur yang belum efektif;
2. Belum adanya kebijakan daerah tentang pemberian insentif/kemudahan berinvestasi di Kota Prabumulih;
3. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan publik sesuai Standar Pelayanan Publik;
4. Promosi penanaman modal belum optimal dalam menarik investor di Kota Prabumulih;
5. Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal masih terbatas dan belum mutakhirnya data informasi penanaman modal kota Prabumulih
6. Pendidikan dan Pelatihan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu masih sangat terbatas dan belum optimal.
7. Belum optimalnya kemitraan usaha antara PMA/PMDN dengan UMKM

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

No.	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra OPD Kab/Kota	Capaian Sasaran Renstra SKPD Provinsi	Capaian Sasaran Renstra Kementerian/ Lembaga
1.	Nilai SAKIP	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dengan mengedepankan transparansi & akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, professional dan responsif	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan melayani
2.	Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan			
3.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	Maju pelayanan publik berkualitas (meningkatnya pelayanan publik berkualitas)	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/ penanam modal
4.	Jumlah Investasi PMDN dan PMA	Meningkatnya realisasi investasi	Maju investasi, industri dan perdagangan (Meningkatnya investasi, industri dan perdagangan)	Meningkatnya realisasi penanaman modal

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.2.1 Tujuan

Tujuan OPD merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ini ditetapkan dengan berpedoman kepada pernyataan visi dan misi Walikota Prabumulih serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis.

Tujuan yang telah ditetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
2. Terlaksananya Realisasi Investasi Penanaman Modal ditunjang Pelayanan Perizinan/Non Perizinan yang Prima dan Berkualitas.

3.2.2 Sasaran Strategis

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran-sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih adalah:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan
3. Peningkatan dan Pengembangan Investasi Daerah

Tabel 3.2 Sasaran dan Indikator Kinerja DPMPSTSP Tahun 2022

No.	Sasaran Renstra	Indikator	Sumber Data	Keterangan
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	1. Nilai SAKIP	SAKIP	Nilai akuntabilitas kinerja berupa peringkat/predikat dalam mengidentifikasi kemampuan OPD perihal merencanakan, menyelaraskan, dan melaporkan capaian kinerja
		2. Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	LAKIP Laporan Keuangan	
2.	Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai SKM = Nilai Indeks x Nilai Dasar SKM (25)
3.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Persentase Realisasi Investasi	Data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online Kota Prabumulih	Realisasi Investasi Tahun N / Target Investasi Tahun N x 100

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

Kode Program	Program	Kode Kegiatan	Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	2024	
							Target	Pagu (Rp)
x.xx.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	x.xx.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	x.xx.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3,000,000
				x.xx.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2,000,000
				x.xx.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2,000,000
				x.xx.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3,000,000
				x.xx.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2,000,000
		x.xx.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	x.xx.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/bulan	6,335,356,090
				x.xx.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	53,280,000

Kode Program	Program	Kode Kegiatan	Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	2024	
							Target	Pagu (Rp)
				x.xx.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3,000,000
				x.xx.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	3,000,000
		x.xx.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	x.xx.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1,500,000
				x.xx.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10,800,000
		x.xx.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	x.xx.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	1,500,000
				x.xx.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	72,000,000
				x.xx.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1,000,000
				x.xx.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1,000,000

Kode Program	Program	Kode Kegiatan	Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	2024	
							Target	Pagu (Rp)
				x.xx.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	15,000,000
				x.xx.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	35 Orang	12,000,000
		x.xx.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	x.xx.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10,000,000
				x.xx.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30,000,000
				x.xx.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	9,000,000
				x.xx.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	40,000,000
				x.xx.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	55,000,000
				x.xx.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	15,000,000
				x.xx.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	70,000,000

Kode Program	Program	Kode Kegiatan	Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	2024	
							Target	Pagu (Rp)
				x.xx.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	25,000,000
				x.xx.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	400,000,000
		x.xx.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	x.xx.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	40,000,000
				x.xx.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	60,000,000
		x.xx.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	x.xx.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5,000,000
				x.xx.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	90,000,000
				x.xx.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	30,000,000
				x.xx.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	70,000,000
		x.xx.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	x.xx.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	120,000,000

Kode Program	Program	Kode Kegiatan	Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	2024	
							Target	Pagu (Rp)
				x.xx.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100,000,000
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	2.18.042.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.18.042.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1000 Pelaku Usaha	20,000,000
				2.18.042.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	100 Kegiatan Usaha	30,000,000
				2.18.042.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	12 Orang	15,000,000
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.18.02.2.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	300,000,000

Kode Program	Program	Kode Kegiatan	Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	2024	
							Target	Pagu (Rp)
		2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	200,000,000
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	30 Kegiatan Usaha	20,000,000
				2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	40 Pelaku Usaha	40,000,000
				2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	30 Kegiatan Usaha	20,000,000
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	3 Dokumen	80,000,000
Total								8,415,436,090

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DPMPTSP KOTA PRABUMULIH TAHUN 2023

Alokasi anggaran untuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2024

Rencana Kerja Tahun 2024					
Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output Sub Kegiatan	Target	(Rp)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3,000,000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2,000,000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2,000,000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3,000,000
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2,000,000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/bulan
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	53,280,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3,000,000

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output Sub Kegiatan	Target	(Rp)
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	3,000,000
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1,500,000
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10,800,000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	1,500,000
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	72,000,000
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1,000,000
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1,000,000
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	15,000,000
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	35 Orang	12,000,000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30,000,000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	9,000,000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	40,000,000

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output Sub Kegiatan	Target	(Rp)
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	55,000,000
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	15,000,000
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	70,000,000
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	25,000,000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	400,000,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	40,000,000
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	60,000,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5,000,000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	90,000,000
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	30,000,000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	70,000,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	120,000,000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100,000,000

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output Sub Kegiatan	Target	(Rp)
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	300,000,000
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	200,000,000
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1000 Pelaku Usaha	20,000,000
		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	100 Kegiatan Usaha	30,000,000
		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	12 Orang	15,000,000
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	30 Kegiatan Usaha	20,000,000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	40 Pelaku Usaha	40,000,000

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output Sub Kegiatan	Target	(Rp)
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	30 Kegiatan Usaha	20,000,000
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi secara elektronik	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	3 Dokumen	80,000,000
			Total		8,415,436,090

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Rencana Strategis DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2019-2023 dalam menunjang tercapainya visi dan misi Kota Prabumulih serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Prabumulih Tahun 2023.

Rencana Kerja DPMPTSP ini digunakan sebagai bahan dalam forum OPD dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun 2024 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022.



Kepala DPMPTSP,

(Handwritten signature)
A. Zahedi, S.Pd., MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19630501 198803 1 005